

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan payung besar yang mencakup segala bentuk teknologi yang berkaitan dengan pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran informasi. Menurut Maryono teknologi informasi adalah seperangkat sistem atau prosedur yang manusia gunakan sebagai sarana untuk bertukar pesan dan informasi (Ernasari, 2023). Teknologi ini juga melibatkan pemanfaatan komputer sebagai alat untuk mengelola, menampilkan, dan memproses data dan informasi, yang didukung oleh berbagai peralatan komunikasi. Fungsi TIK merentang luas, mulai dari memfasilitasi komunikasi instan melintasi batas antar pulau dan benua, menyediakan akses tak terbatas kepada sumber informasi dan pengetahuan, hingga mendorong efisiensi dalam berbagai aktivitas ekonomi dan sosial. Manfaat TIK dalam kehidupan sehari-hari terasa dalam berbagai aspek, termasuk kemudahan berinteraksi, berbelanja daring, mengakses layanan pendidikan dan kesehatan, hingga menikmati hiburan digital.

Perkembangan pesat TIK juga membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan secara global. Di berbagai negara, pemanfaatan teknologi digital telah mengubah cara pemerintah beroperasi dan berinteraksi dengan warga negaranya. Konsep pemerintahan elektronik (*e-government*) muncul sebagai respons terhadap potensi TIK dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Transformasi digital dalam pemerintahan mencakup berbagai kegiatan, mulai dari penyediaan layanan publik secara daring, pengelolaan data dan informasi secara terintegrasi, hingga pelibatan masyarakat dalam proses kebijakan melalui media digital.

Di Indonesia, kesadaran akan pentingnya pemanfaatan TIK dalam pemerintahan semakin menguat dan hal tersebut tercerminkan pada landasan hukum yang mendorong implementasi *e-government* berupa Peraturan Presiden Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Peraturan Presiden, 2018). Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih

efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Implementasi *e-government* tidak hanya berdampak pada pemerintahan pusat, tetapi juga sampai ke dalam bentuk terkecil dari pemerintahan yaitu pemerintah desa. Semakin banyaknya divisi dan lembaga pemerintah yang menerapkan *e-government*, maka tujuan dari Instruksi Presiden tentang SPBE akan mudah tercapai. Hal tersebut dimulai dari pemerintahan yang paling dasar dalam pengelolaan dan pelayanan masyarakat, yaitu pemerintah desa. Pemerintah desa berperan krusial dalam pengembangan *e-government* dikarenakan dengan penerapan *e-government* pada tingkat desa akan membantu lembaga atau organisasi pemerintah lainnya dalam membangun sistem pemerintahan yang berorientasi ke arah elektronik.

Terdapat tantangan yang harus diselesaikan bagi pemerintah desa untuk membangun *e-government* pada tingkat desa. Adapun tantangan yang menjadi penghambat dari penerapan *e-government* pada tingkat desa yaitu keterbatasan infrastruktur digital pada desa yang menghambat kegiatan pertukaran informasi dan mengurangi kemampuan desa meningkatkan pelayanan masyarakat. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di desa yang belum kompeten dalam bidang TIK, serta rendahnya literasi digital baik dari aparat pemerintah desa dan masyarakat desa.

Dalam implementasi *e-government* oleh pemerintah desa, *website* desa memiliki peran penting sebagai *platform* utama untuk penyebaran informasi desa, fasilitasi komunikasi antara pemerintah desa dan warga, penyediaan layanan publik dasar secara daring, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan *website* desa memiliki keterbatasan tergantung dengan infrastruktur digital di desa dan kemampuan desa dalam mengelola *website* desa. Diperlukan perancangan strategi komunikasi yang efektif guna mendukung optimalisasi penggunaan *website* desa.

Strategi komunikasi sangat penting agar pesan atau informasi yang dibagikan melalui *website* desa dapat diterima dan dimengerti oleh masyarakat. Terdapat aspek strategi komunikasi yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa dalam

merancang strategi komunikasi, dimana berdasarkan aspek strategi komunikasi yang diterapkan ini dapat mempengaruhi seberapa besar keberhasilan dari penerapan strategi komunikasi. Adapun aspek tersebut adalah tujuan komunikasi yang jelas, target audiens dari kegiatan komunikasi, pesan yang ingin disampaikan, saluran komunikasi, metode penyampaian, *feedback* dan evaluasi, konteks (Effendy, 2017).

Pemerintah Desa Pandean menerapkan *e-government* dengan menggunakan *website* desa sebagai wadah utama dari kegiatan komunikasi dan informasi kepada masyarakat desa. *Website* desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa Pandean mengandung konten informasi terkait acara desa, kegiatan pemerintahan seperti pembangunan infrastruktur desa, data kependudukan dari Desa Pandean, informasi mengenai aparat pemerintah desa dan profil Desa Pandean.

Akan tetapi terdapat faktor yang menghambat proses perkembangan penerapan *e-government* di Desa Pandean. Faktor tersebut berupa rendahnya literasi digital oleh masyarakat desa dan rendahnya SDM di desa yang memiliki kompetensi dalam bidang TIK. Mayoritas masyarakat desa belum dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi (TIK) yang telah mengubah tata kelola pemerintahan di desa. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat topik ini menjadi skripsi yang berjudul “Strategi Komunikasi Pemerintahan Desa Pandean Kabupaten Ngawi Dalam Membangun *E-Government* Melalui *Website* Desa”. Dengan tujuan untuk mengetahui strategi komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pandean dalam membangun *e-government* melalui *website* desa.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pandean Kabupaten Ngawi dalam membangun *e-government* melalui *website* desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi Pemerintah Desa Pandean Kabupaten Ngawi dalam membangun *e-government* melalui *website* desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan diadakan penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan dan pengetahuan pada bidang strategi komunikasi, secara spesifik mengenai penelitian terhadap proses komunikasi pemerintah dalam membangun *e-government* melalui media *website* sehingga dapat menjadi pijakan atau referensi dalam dilakukannya penelitian yang serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan terkait kegiatan strategi komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pandean Kabupaten Ngawi dalam membangun *e-government* melalui *website* desa.

